

Konflik Sosial Kekerasan Bersenjata dan Keamanan Masyarakat Sipil Di Intan Jaya Papua

Aura Imelda Azari¹, Savira Indah Septia Putri², Sylvia Faradiba^{3*}, Maheswari Raynasywa Raselhague⁴, Dimas Aditya Hendrayana⁵, Pramudita Aris Widodo⁶,
Nabila Auliyaul Haq⁷, Agus Subianto⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah
Email: sylviafaradiba60@gmail.com^{1*}

Abstrak

Konflik di Intan Jaya, Papua Tengah, mengalami peningkatan sejak akhir tahun 2019 dan hingga kini menjadi salah satu konflik bersenjata paling kompleks di Indonesia. Konflik yang melibatkan pasukan keamanan negara dan kelompok bersenjata TPNPB/KKB ini menimbulkan dampak signifikan bagi warga sipil, seperti pengungsian massal, terganggunya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta trauma sosial yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab konflik di Intan Jaya serta mengevaluasi respons negara terhadap konflik tersebut dengan menggunakan pendekatan teoritis konflik dan resolusi konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bersumber dari jurnal akademik, laporan Komnas HAM, media kredibel, serta penelitian terdahulu terkait konflik Papua dan kasus serupa seperti Nduga, Poso-Sigi, Rempang, dan Wadas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tidak semata-mata berakar pada persoalan keamanan, melainkan juga dipengaruhi oleh ketidakadilan historis, marginalisasi sosial, dan ketimpangan pembangunan yang dialami masyarakat Papua. Pendekatan negara yang cenderung militeristik justru meningkatkan ketegangan dan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat. Melalui teori konflik struktural Karl Marx, penelitian ini mengidentifikasi ketimpangan relasi kekuasaan dan penguasaan sumber daya sebagai pemicu utama konflik. Sementara itu, Teori Identitas Sosial dan Teori Resolusi Konflik menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Studi ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang humanis, dialogis, serta pembangunan yang adil dan inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal secara bermakna.

Keywords: Keamanan, Ketimpangan, Konflik, Papua, Resolusi

PENDAHULUAN

Persoalan konflik di Indonesia masih seringkali terjadi seperti konflik MIT Poso-Sigi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada tahun 2020-2021 yang melibatkan antara masyarakat Islam dan Kristen, serangan Poso-Sigi dilakukan oleh kelompok teroris mujahidin Indonesia Timur (MIT) terhadap keluarga kristen yang mengakibatkan 24 rumah warga dan tiga unit sepeda motor dibakar yang berada di Dusun IV Desa Pesaku. Konflik Nduga - Penembakan Massal, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua

Pegunungan pada tahun 2022 yang melibatkan antara TNI-Polri, KKB, dan Warga sipil yang terdampak, Banyak korban jiwanya Pelanggaran HAM, Pengungsian besar besaran, pendidikan dan pelayanan publik terganggu, kerusakan lingkungan. Konflik sengketa antara warga lokal dan pemerintah Rempang, Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada tahun 2023, Pihak yang terlibat yaitu masyarakat pemerintah dan PT Makmur Elok Graha, dan banyaknya warga kehilangan tempat tinggal, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah, dan hilangnya tempat tinggal dan mata pencaharian. Konflik antara warga desa wadas dengan pemerintah, Purworejo, Jawa Tengah pada tahun 2022, adapun Pihak yang terlibat warga wadas, Polda Jateng, Pemerintah Daerah, dan Kementrian PUPR yang mengakibatkan Kerusakan lingkungan, rusaknya kepercayaan terhadap pemerintah, dan terganggunya aktivitas Masyarakat. Konflik sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan karet, Kab. Tulang Bawang Barat, Prov. Lampung pada tahun 2022, Pihak yang terlibat masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan karet yang menimbulkan huru hara yang dapat menyebabkan korban jiwa, hingga kurangnya pemberdayaan sosial dan CSR perusahaan. Konflik rasionalitas antara pemerintah dengan masyarakat, Desa Prabu, Prov. NTB pada tahun 2011, Pihak yang terlibat yaitu masyarakat lokal, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintrah Prov. NTB, dan pengusaha serta aktivis pariwisata, yang mengakibatkan Kerusakan lingkungan dan kesehatan, adanya tumpang tindih dan kewenangan. Kerusakan lingkungan dan kesehatan, adanya tumpang tindih dan kewenangan pada tahun 2017-2018, Pihak yang terlibat yaitu Pemerintah, Perusahaan minyak, dan masyarakat local, yang mengakibatkan banyaknya korupsi dan penyuapan, kompensasi tidak adil, perampasan tanah.

Konflik yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, merupakan salah satu konflik bersenjata di Indonesia. Permasalahan keamanan dan kemanusiaan yang hingga kini menjadi perhatian nasional, wilayah ini

menjadi arena bentrok antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNB) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) (Irfani, 2025).

Konflik Intan Jaya mulai meningkat sejak akhir tahun 2019 dan masih terus berlangsung hingga tahun 2025 dengan berbagai insiden kekerasan yang terjadi. Bentrokan ini menimbulkan berbagai dampak serius, seperti penembakan massal, dan gangguan terhadap pelayanan publik seperti pendidikan serta kesehatan. Faktor ketidakadilan sosial, minimnya akses terhadap pelayanan publik serta pendekatan keamanan yang terlalu militeristik juga memperburuk keadaan di wilayah tersebut. Selama bertahun-tahun masyarakat Papua merasa tidak memperoleh kesejahteraan yang seimbang dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Ketimpangan tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan dan memperkuat sentimen terhadap pemerintah pusat.

Kompleksitas permasalahan tersebut, konflik di Intan Jaya tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan keamanan semata, melainkan juga persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling terkait. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen konflik yang tepat dengan mengedepankan resolusi damai, serta kebijakan pembangunan yang lebih adil dan manusiawi bagi masyarakat papua. Dan juga untuk menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun guna mendukung politik dan kebijakan pemerintah

dalam rangka pembangunan demokrasi, memberdayakan penyelenggara pemerintahan serta memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat, meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat, serta agar pelaksanaan program pembangunan dapat diikuti dengan tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Secara teoretis, konflik-konflik tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Konflik dan Kekerasan Struktural, Teori Keamanan (*state security dan human security*), serta Teori Gerakan Sosial dan Konflik Sumber Daya untuk melihat dinamika perebutan kekuasaan, akses sumber daya, dan resistensi masyarakat. Dalam melihat keseluruhan pola konflik, digunakan metode gabungan (*mixed approach*) yang mengintegrasikan perspektif politik-keamanan, sosial-ekonomi, dan partisipasi masyarakat, sehingga memberikan gambaran utuh bahwa konflik muncul akibat ketimpangan kekuasaan, kebijakan pembangunan yang tidak partisipatif, serta respons keamanan negara yang sering menempatkan masyarakat sipil sebagai pihak paling rentan. Adapun konflik serupa di Indonesia sebagaimana tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Konflik Sosial di Indonesia Tahun 2011-2023

No	Kasus Konflik	Tahun	Pihak Berkonflik	Akibat
1.	Konflik MIT Poso-Sigi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah	2020-2021	Antara masyarakat Islam dan Kristen, serangan poso sigi dilakukan oleh kelompok teroris mujahidin Indonesia Timur (MIT) terhadap keluarga kristen.	akibatnya 24 rumah warga dan tiga unit sepeda motor dibakar yang berada di Dusun IV Desa Pesaku.
2.	Konflik Nduga - Penembakan Massal, Kabupaten Nduga, Provinsi	2022	Antara TNI-Polri, KKB, dan Warga sipil yang terdampak.	Banyak korban jiwa, Pelanggaran HAM, Pengungsian besar besaran, pendidikan dan

	Papua Pegunungan			pelayanan publik terganggu, kerusakan lingkungan.
3.	Konflik sengketa antara warga lokal dan pemerintah Rempang, Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau	2023	Pihak yang terlibat yaitu masyarakat pemerintah dan PT Makmur Elok Graha.	warga kehilangan tempat tinggal, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan hilangnya tempat tinggal dan mata pencaharian,
4.	Konflik antara warga desa wadas dengan pemerintah, Purworejo, Jawa Tengah	2022	Pihak yang terlibat warga wadas, Polda Jateng, Pemerintah Daerah, dan Kementerian PUPR	Kerusakan lingkungan, rusaknya kepercayaan terhadap pemerintah, dan terganggunya aktivitas masyarakat
5.	Konflik sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan karet, Kab. Tulang Bawang Barat, Prov. Lampung	2022	Pihak yang terlibat masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan karet	menimbulkan huru-hara yang dapat menyebabkan korban jiwa, hingga kurangnya pemberdayaan sosial dan CSR perusahaan
6.	Konflik rasionalitas antara pemerintah dengan masyarakat, Desa Prabu, Prov. NTB	2011	Pihak yang terlibat yaitu masyarakat lokal, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintrah Prov. NTB, dan pengusaha serta aktivis pariwisata	Kerusakan lingkungan dan kesehatan, adanya tumpang tindih dan kewenangan
7.	Konflik sosial dalam ekonomi minyak Uganda yang sedang berkembang, Wilayah Albertine Graben, Uganda	2017-2018	Pihak yang terlibat yaitu Pemerintah, Perusahaan minyak, dan masyarakat lokal	Banyaknya korupsi dan penyuapan, kompensasi tidak adil, perampasan tanah

Sumber: diolah penulis (2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis mengenai konflik Intan Jaya Papua, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Sumber yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, laporan Komnas HAM, berita media kredibel, dokumen akademik, serta penelitian terdahulu mengenai konflik Papua dan kasus konflik

lain seperti Nduga, Rempang, Wadas, dan Poso–Sigi. Melalui metode literatur, seluruh data dikaji menggunakan proses reduksi dan interpretasi konseptual untuk menemukan pola penyebab, dinamika konflik, aktor yang terlibat, serta dampak sosial yang muncul. Analisis kemudian diperkuat dengan teori-teori seperti Teori Konflik Struktural Karl Marx, Teori Identitas Sosial, dan Teori Resolusi Konflik John Burton. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menyajikan gambaran komprehensif tanpa terikat pada pengumpulan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Intan Jaya, sebuah kabupaten di Papua Tengah, sejak akhir 2019 menjadi pusat konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok TPNB/KKB. Konflik ini dipicu oleh ketimpangan pembangunan, pendekatan keamanan yang keras, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat.

Menurut laporan Komnas HAM (2024), bentrokan bersenjata yang terus berulang menyebabkan banyak warga sipil mengungsi, hilangnya akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta trauma sosial yang mendalam. Banyak desa yang hancur akibat bentrokan, dan masyarakat terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih aman. Dampak sosial dari konflik ini juga terlihat dari menurunnya akses warga terhadap layanan dasar, yang semakin memperparah ketidakstabilan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan antara tahun 2019 hingga 2025, tercatat puluhan insiden kekerasann dengan

korban jiwa yang cukup signifikan dan jumlah pengungsi yang terus bertambah. Konflik yang berkepanjangan ini tidak hanya mencerminkan masalah keamanan semata, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakadilan struktural yang mendasar, seperti ketimpangan pembangunan. Kondisi ini mempertegas perlunya pendekatan penyelesaian yang komprehensif dan berperspektif kemanusiaan.

Menurut teori konflik sosial, konflik muncul akibat ketimpangan sosial, perebutan sumber daya, dan ketidakadilan struktural (Marx, 1848). Dalam kasus Papua, termasuk Intan Jaya, konflik berakar pada marginalisasi ekonomi, sosial, politik yang telah berlangsung lama. Konflik dianggap sebagai hasil dari pertentangan antara kelompok yang dominan (penguasa) dengan kelompok sub ordinat (masyarakat yang tertindas).

Teori Identitas Sosial juga dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika konflik di wilayah ini. Teori ini menyoroti bahwa konflik dapat muncul ketika individu atau kelompok merasa bahwa identitas sosial mereka yang mencakup budaya, bahasa, agama, tidak dihargai atau bahkan terancam oleh kelompok lain. Sentimen ini diperparah oleh masuknya budaya luar secara masif, ketidakseimbangan dalam pembangunna, serta pendekatan keamanan yang dianggap mengabaikan aspek kemanusiaan dan kearifan lokal. Akibatnya, muncul perlawanan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga simbolik sebagai bentuk pembelaan terhadap identitas mereka.

Teori Resolusi Konflik yang dikembangkan oleh Lewis A. Coser (1956)

berpendapat bahwa penyelesaian konflik yang bersifat jangka panjang harus berfokus pada kebutuhan dasar manusia, seperti rasa aman, pengakuan identitas, partisipasi, dan keadilan. Penyelesaian konflik di Intan Jaya tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan atau bantuan ekonomi, melainkan juga harus mencakup penghargaan terhadap hak-hak budaya, partisipasi politik yang setara, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat Papua.

Konflik di Intan Jaya Papua bukanlah konflik biasa yang bersifat sementara, melainkan konflik struktural yang bersumber dari ketidakadilan historis dan sosial yang dialami masyarakat Papua selama bertahun-tahun. Fakta ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori konflik struktural Karl Marx, yang menyatakan bahwa ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya akan memunculkan konflik antara kelompok dominan (dalam negara) dan kelompok tertindas (masyarakat lokal Papua).

Pemerintah pusat dianggap memegang kendali penuh atas kebijakan dan pembangunan di Papua, sementara masyarakat asli sering kali hanya menjadi penonton dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tanah dan kehidupan mereka. Akibatnya, muncul perasaan terpinggirkan, frustrasi, dan marah yang memicu perlawanan dalam bentuk konflik terbuka, termasuk melalui kelompok bersenjata seperti TPNPB.

Pendekatan ini bertentangan dengan teori kebutuhan dasar manusia dari Lewis A. Coser (1956) yang menekankan bahwa konflik hanya bisa diselesaikan secara jangka panjang apabila kebutuhan dasar seperti rasa

aman, pengakuan identitas, keadilan, dan partisipasi terpenuhi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik di Intan Jaya, salah satu langkah yang diambil adalah peningkatan operasi militer untuk menumpas kelompok bersenjata, serta pembangunan infrastruktur melalui program Otonomi Khusus Papua.

Pendekatan damai melalui dialog inklusif yang melibatkan tokoh adat, gereja, masyarakat sipil, dan kelompok pro-kemedeekaan sangat diperlukan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Penyelesaian konflik juga harus mencakup jaminan hak asasi manusia, peningkatan kualitas layanan publik, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka merasa memiliki peran dan masa depan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Konflik di Intan Jaya Papua merupakan hasil akumulasi ketidakadilan sosial, ketimpangan pembangunan, serta pendekatan keamanan yang represif. Bentrokan antara aparat dan kelompok bersenjata menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, terutama warga sipil. Upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan pemerintah masih belum efektif, karena minimnya dialog dan keterlibatan masyarakat lokal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada lembaga afiliasi penulis atas dukungan akademik yang diberikan selama pelaksanaan penelitian dan penulisan manuskrip ini. Penulis juga menyampaikan

apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Agus Subianto, M.Si. atas bimbingan, arahan, serta kontribusi pemikiran yang sangat berharga dalam proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kerja sama, baik melalui diskusi, masukan, maupun dukungan moral, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Seluruh kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam menunjang kelancaran dan kualitas penulisan manuskrip ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A., & Dwimawanti, I. (2020). *Rationality Conflict Between the Government and The Community: A Case Study on Illegal Gold Mining in Prabu Village, West Nusa Tenggara Province*. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2019.2294345>
- Fuzain, N. A. (2023). Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1081–1088. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.798>
- Hutahaen, G. S., & Lase, F. J. (2021). Pembingkai Berita Konflik Bersenjata Nduga Di Tabloidjubi.Com. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 115–126. <https://doi.org/10.14710/interaksi.10.2.115-126>
- Ilyas. (2014). Kajian penyelesaian konflik antar desa berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 6(1), 1213–1227.
- Irfani, F. (2025). *Kontak senjata terulang di Intan Jaya Papua, warga sipil jadi korban*. BBC News Indonesia.
- Ogwang, T., Vanclay, F., & van den Assem, A. (2019). Rent-seeking practices, local resource curse, and social conflict in Uganda's emerging oil economy. *Land*, 8(4). <https://doi.org/10.3390/land8040053>
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). *The Concept of Conflict and the Theory of Social Conflict in Karl Marx ' s Thought Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial dalam Pemikiran Karl Marx*. 1(1), 1–11.
- Salsabila, A. S., Sefani, A., Kirsanto, T. N., Arsita, L. Y., & Nurdin, N. (2023). Konflik Agraria dan Keterlibatan Rezim Lokal pada Konflik Desa Wadas. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.80>
- Sari, A. N., Halley, M., Author, Y., Juhaidi, A., Afifah, A., Maulida, P., & Author, H. (2023). The Impact of Village Funds on Village Electrification in Indonesia Pendidikan , Kesehatan , dan Kemiskinan (Studi tentang Efek Pendidikan terhadap Kesehatan dan Kemiskinan di Indonesia) Disparitas Penetapan Perwalian Ayah Terhadap Anak Kandung Pada Pen. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(4).
- Subianto, A. (2014). *Konflik Nelayan Dalam Tiga Rezim*.
- Valentine, E., Muhamad, M. N., Ikhsan, M., & Hakim, N. (2023). Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx. *Das Sollen*, 2023, 1–17.